

**STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN
PAJAK DAERAH DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN
KEUANGAN DAN MENUNJANG KEMANDIRIAN PEMERINTAH
KABUPATEN PASURUAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh :

FLORIDA KAHATA JAWA

NIM : 2016110062

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI**

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI

**MALANG
2021**

RINGKASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan fungsi dan kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan mencari metode untuk meningkatkan pendapatan dan inisiatif untuk memperkuat pemungutan pajak daerah. Rencana eksplorasi menggunakan teknik yang secara subyektif eksplisit. Organisasi tersebut berencana menggunakan pemantauan, menggunakan juru sita untuk melakukan pemungutan, dan bekerja sama dengan otoritas lain untuk melakukan penagihan dan ekstensifikasi objek daerah yang belum teridentifikasi sebagai bagian dari tujuannya untuk meningkatkan pemungutan pajak daerah, menurut hasil penelitian. Struktur Bapeda bertujuan untuk menjaga independensi Pemerintahan Rezim Pasuruan sekaligus memperkuat kapasitas keuangannya. mendukung sistem dokumentasi biaya online sebagai tambahan. Mendorong individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ramah kelompok, seperti menurunkan denda keterlambatan angsuran penilaian untuk menghindari masalah bagi warga, dan membuat kerangka kerja yang mengakomodasi angsuran biaya, adalah contoh penerapan model program ini. memenuhi kewajiban finansialnya. Metodologi Pendukung Aset, khususnya dengan meningkatkan jumlah otoritas penilaian dan terlebih lagi mewajibkan satu perwakilan untuk memenuhi banyak tugas yang diberikan kepadanya. strategi kelembagaan seperti bekerja sama dengan otoritas lain, mengeluarkan poster, stiker, dan peringatan, mengingatkan wajib pajak yang gagal melakukan penyetoran tepat waktu, memverifikasi pembayaran untuk wajib pajak tersebut, dan Tujuan dari penggalangan pendapatan penilaian teritorial adalah untuk mendukung kemandirian finansial dan batasan pendapatan. Pemerintahan Pasuruan melalui peningkatan basis pendapatan, penyempurnaan strategi pemilahan, penguatan kewenangan pengawas pendapatan daerah, penguatan pengawasan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan prakiraan potensi pendapatan.

Kata Kunci: *Strategi, Pajak Daerah, Kemampuan Keuangan dan Kemandirian Pemerintah*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Meskipun kemiskinan meningkat akibat krisis ekonomi dan kepercayaan di Indonesia, transformasi besar di banyak aspek masyarakat Indonesia juga dimungkinkan oleh krisis ini. Sebagai bagian dari reaksi yang lebih luas terhadap krisis ekonomi dan kepercayaan negara serta dimulainya era baru, reformasi menyeluruh mencakup pemberian otonomi. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Ketetapan Nomor IV/MPR/2000 tentang Usulan Strategi Dalam Penyelenggaraan Kemerdekaan Wilayah oleh MPR-RI.

TAP MPR memberikan akses terhadap perubahan aturan-aturan umum yang juga telah mengalami beberapa penyesuaian. Antara lain, Peraturan Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perubahan Dana Daerah dan Provinsi serta Peraturan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diganti dengan Peraturan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Ekologis, yang kemudian direvisi dengan Peraturan Nomor 12 Tahun 2008. Kekuasaan umum diganti berdasarkan Pedoman No. 33 (2004) tentang Persahabatan Terkait Uang antara Negara Pusat dan Negara Biasa. Peredaran aset lokal, umum, dan fokus biasanya dipengaruhi oleh peningkatan ini.

Mengenai uraian sebelumnya, Halim (2004: 187) menjelaskan bahwa suatu wilayah yang dapat mempertahankan kemandiriannya harus mencakup ciri-ciri penting sebagai berikut: 1) Batasan keuangan daerah, dan hal itu mengisyaratkan adanya tuntutan agar lokasi mempunyai kewenangan dan kemampuan. bisa melihat.

(2) Untuk memaksimalkan sumber daya keuangannya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak terlalu bergantung pada dukungan pemerintah. Hal ini dijamin oleh mekanisme penyeimbangan uang adat dan masyarakat, yang didukung oleh organisasi regional negara tersebut.

Permasalahan Rezim Pasuruan bermula dari persoalan biaya administrasi publik yang membengkak sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah (kebutuhan keuangan) namun kecepatan pengembangan gaji provinsi (batas moneter) tidak diperlukan sehingga menciptakan kekosongan keuangan di daerah tersebut. Oleh karena itu, untuk menutup defisit anggaran dan mendorong kemandirian, pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan berupaya memperkuat kemampuan fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada pembiayaan pusat (S. Loce, 2011).

Kenaikan tersebut merupakan program perpajakan yang sangat cerdas yang harus dilakukan agar dapat memberikan keuntungan dan membantu meningkatkan pendapatan PAD. Pengeluaran mungkin memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian provinsi karena mempunyai kapasitas yang luas dan beragam sehingga dapat diandalkan karena tidak berbahaya bagi produk ekologi. Oleh karena itu, menyelidiki kemungkinan sumber bea teritorial sangat penting untuk mempertahankan pendapatan lingkungan (Susi Lawati, 2018).

Pasalnya, ada sejumlah variabel tambahan yang mungkin mempengaruhi efektivitas otonomi daerah selain kepemilikan keuangan daerah atau PAD. Sebagai contoh, perhatikan unsur-unsur seperti standar sarana, prasarana, dan sumber daya manusia; sumber dana abadi; penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan sistem informasi yang dapat diakses. Salah satu cara untuk menilai kemampuan suatu

lokasi untuk melaksanakannya secara bebas adalah dengan membagi jumlah agregat Bantal yang diterima suatu kabupaten. Jika berbagai asosiasi (dalam hal ini lokal dan negara bagian) tidak memberikan bantuan dari luar, daerah akan kesulitan mengelola dan melindungi diri mereka sendiri dengan sumber daya yang memadai (M.N. Afandi, 2018).

PAD Kabupaten Pasuruan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. PAD mencapai Rp7.945.825.377 pada tahun 2005, dengan kontribusi hanya sekitar 4,45% terhadap APBD. Angka ini meningkat menjadi Rp. 8.962.542.100 pada tahun 2006, namun kontribusinya menurun sekitar 3,20% dari APBD sebesar Rp. 279.511.013.700. Pada tahun 2007, PAD melebihi Rp11.460.674.100,- atau sekitar 3,65% dari total kontribusi APBD sebesar Rp 313.420.036.249. Pada tahun 2008, laju kenaikannya terus berlanjut, dengan PAD mencapai Rp14.166.551.839,00 dan kontribusi APBD mencapai Rp341.019.508.306. PAD mencapai Rp 19.380.294.898 pada tahun 2009, namun persentasenya masih kecil terhadap APBD. Meskipun PAD terus melakukan ekspansi, potensi Kabupaten Pasuruan untuk mencapai kemandirian finansial dipengaruhi oleh kecilnya kontribusi PAD terhadap APBD, sehingga tetap dapat diandalkan oleh pemerintah federal.

Peneliti memutuskan untuk meneliti: “**Strategi Peningkatan Pendapatan Dan Penerimaan Pajak Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Keuangan Dan Menunjang Kemandirian Pemerintah Kabupaten Pasuruan**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berikut kemungkinan pernyataan permasalahan berdasarkan latar belakang permasalahan di atas:

1. Bagaimana rencana peningkatan pendapatan pajak daerah untuk mendukung kemandirian Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan memperluas kapasitas keuangan?
2. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, tindakan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sebagai hasil dari rumusan masalah yang diuraikan di atas, tujuan berikut harus dipenuhi:

1. Mengidentifikasi cara meningkatkan pendapatan dalam upaya memperkuat kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan mempertahankan kemandiriannya.
2. Menentukan cara untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah dalam upaya memperkuat kedudukan keuangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan mempertahankan kemandiriannya.

1.3.1 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas kesadaran, memberikan pandangan segar, dan menambah pengetahuan tentang strategi peningkatan pendapatan daerah dan penerimaan pajak dalam upaya menjaga independensi pemerintah dan meningkatkan kapasitas keuangan.

2. Bagi pemerintah

Untuk memperkuat kemampuan keuangan dan mendorong kemandirian pemerintah, studi ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak data untuk dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan ketika menyusun undang-undang yang berkaitan dengan keuangan daerah dan kinerja perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP–AMP YKPN.
- Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat,
- Afandi, M. N. 2018. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 19(2), 1-22.
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hermawan, E. 2021. Pengaruh Retribusi Pasar Dan Retribusi Persampahan/Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Sukabumi (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah). *Jurnal Akuntansi UMMI*, 1 (2), 10-24.
- Insukindro. 1995. *Ekonomi Uang dan Bank, Teori Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Kerlinger. 2012. *Asas–Asas Penelitian Behaviour*. Edisi 3, Cetakan 7. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kuncoro, Mudrajad. 2011. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Erlangga: Jakarta.
- Lawati, S. 2018. Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 1(1), 40-56.
- Lubis, A. S., & SH, M. 2015. Pengelolaan sumber penerimaan pajak sebagai sumber pendanaan utama dalam pembangunan. *Anggaran dan Perbendaharaan*, 1-6.
- Loce, S. 2011. Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian Fiskal (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pasuruan). *Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya*.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta:Penerbit Andi.

- Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nirzawan. 2010. *Tinjauan Umum Terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Bengkulu Utara, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Noviati Putri Wardhani. 2010. *Pengaruh Retribusi Pasar dan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo*. Sidoarjo.
- Raga, A. W. 2011. Analisis Kinerja Penerimaan Retribusi Pasar Di Kabupaten Demak Tahun 2006-2009. *Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro*.
- Saragih. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan. 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Umar, Husein. 2010. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Wibauati, B. L. 2010. Analisis Ektifitas Penarikan Retribusi Pasar Dan Kualitas Pelayanan Pasar Di Pasar Sorong Plaza Kota Serang. Serang.
- Widiana, C. 2010. Kontribusi retribusi pasar dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten Ponorogo. *Doctoral dissertation, Universitas Negeri Malang*.
- Yani. 2012. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.